

Penerapan *Sistem Credit Point* pada Manajemen Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Disiplin Belajar Siswa

Paska Merliana Simanullang^{1*}, Lia Maharani Lubis¹, Darwin¹, Sukarman Purba¹

¹Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: myeuwa@gmail.com

Article History

Received : January 12th, 2026

Revised : January 20th, 2026

Accepted : February 16th, 2026

Abstract: Banyak sekolah menghadapi tantangan dalam menegakkan tata tertib secara konsisten, termasuk rendahnya ketepatan waktu, ketidakteraturan perilaku, dan belum optimalnya sikap tanggung jawab akademik siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam penerapan SCP dalam manajemen pendidikan, menganalisis pengaruhnya terhadap disiplin belajar siswa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Objek penelitian adalah penerapan Sistem Credit Point di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan, sedangkan subjek penelitian mencakup kepala sekolah, wakil kepala kesiswaan, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, serta 12 siswa yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SCP diterapkan melalui alur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis. SCP terbukti berpengaruh positif terhadap perilaku siswa, ditunjukkan oleh berkurangnya keterlambatan, meningkatnya ketertiban selama pembelajaran, kepatuhan terhadap seragam dan etika sekolah, serta meningkatnya tanggung jawab dalam penyelesaian tugas akademik. Keberhasilan implementasi sangat ditopang oleh kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, dan keterlibatan orang tua. Namun demikian, hambatan masih ditemukan pada aspek pemahaman siswa mengenai tujuan SCP, pencatatan manual yang kurang efisien, serta belum optimalnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Credit Point merupakan instrumen manajemen kesiswaan yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa dan membentuk budaya sekolah yang tertib, selama diimplementasikan secara konsisten, kolaboratif, dan didukung dokumentasi yang baik.

Keywords: Disiplin belajar, manajemen pendidikan, *Sistem Credit Point*.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan membantu peserta didik dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara mandiri. Dalam konteks tersebut, mutu pendidikan menjadi aspek fundamental yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik semata, tetapi juga dari kemampuan lembaga pendidikan dalam mengembangkan potensi, karakter, dan kemandirian peserta didik secara menyeluruh.

Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang optimal, diperlukan sistem manajemen pendidikan yang terencana dan terintegrasi. Salah

satu aspek penting dalam manajemen pendidikan adalah administrasi kesiswaan, yang mencakup pengelolaan berbagai aktivitas administratif yang berkaitan langsung dengan peserta didik. Administrasi kesiswaan berperan strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, kondusif, dan mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal (Azizah dkk., 2024). Administrasi ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pengelolaan penerimaan peserta didik baru, layanan bimbingan dan konseling (BK), pengaturan kelas, pengelolaan data siswa, serta pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) (Hasana, 2022).

Namun demikian, masih banyak sekolah yang menghadapi tantangan dalam mengelola

administrasi kesiswaan secara efektif. Ketidakteraturan dalam pelaksanaan administrasi kesiswaan seringkali berdampak pada perilaku siswa, terutama dalam hal kedisiplinan dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Padahal, keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajaran di kelas, tetapi juga oleh efektivitas sistem pendukung yang mengatur kehidupan siswa di sekolah.

Kedisiplinan merupakan aspek karakter yang penting untuk dibentuk melalui proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, termasuk pembiasaan perilaku disiplin (Endriani dkk., 2022). Saat ini, tingkat kedisiplinan peserta didik di banyak sekolah masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi dan kurangnya pengawasan lingkungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum menunjukkan perilaku disiplin yang konsisten, masih sering melanggar aturan, serta kurang menaati tata tertib sekolah (Juliza dkk., 2024).

Disiplin belajar merupakan prasyarat utama dalam pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Sekolah sebagai lembaga formal tidak hanya berperan dalam penyampaian pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan sikap, nilai, dan perilaku peserta didik. Disiplin belajar mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab siswa dalam mengatur waktu, menaati aturan, serta melaksanakan kewajiban akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan disiplin yang terarah, sistematis, serta berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang kini diterapkan di berbagai sekolah adalah Sistem Credit Point (SCP). SCP merupakan pendekatan kuantitatif dalam kebijakan kedisiplinan yang memberikan poin tertentu untuk setiap pelanggaran maupun penghargaan atas perilaku positif. Sistem ini berfungsi sebagai alat pengawasan, pengendalian, serta pembinaan terhadap siswa agar memahami konsekuensi dari setiap tindakan dan menumbuhkan kesadaran disiplin. Penerapan SCP juga sering dipadukan dengan mekanisme hadiah dan hukuman (reward and punishment), yang berperan dalam memperkuat perilaku positif dan mengurangi kecenderungan pelanggaran.

Dalam konteks manajemen pendidikan, keberhasilan penerapan kebijakan seperti SCP sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kepemimpinan kepala sekolah, keterlibatan seluruh stakeholder, komunikasi yang efektif, kapasitas tenaga pendidik, serta sistem dokumentasi dan monitoring yang akurat. Konsistensi dalam penerapan serta legitimasi kebijakan di kalangan siswa menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya disiplin yang berkelanjutan.

SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan Sistem Credit Point sebagai bagian integral dari kebijakan manajemen kesiswaan. Sistem ini mengatur setiap bentuk pelanggaran dengan bobot poin tertentu yang apabila terakumulasi dapat berujung pada sanksi administratif seperti konseling, detensi akademik, atau pembatasan kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun implementasi sistem ini telah berjalan beberapa semester, efektivitasnya dalam meningkatkan disiplin belajar siswa masih memerlukan kajian empiris yang mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan Sistem Credit Point di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan, menganalisis pengaruhnya terhadap disiplin belajar siswa, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan manajemen kesiswaan yang lebih efektif dan berorientasi pada pembentukan karakter disiplin peserta didik secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Furidha (2024), metode “*qualitative descriptive*” merupakan desain yang menekankan penggambaran fenomena dengan menggunakan data naratif dan bukan melalui prosedur statistik atau perhitungan kuantitatif—tujuannya adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi riil yang terjadi di lapangan secara teliti.

Pendekatan ini sangat cocok ketika penelitian bertujuan untuk “menggambarkan apa adanya” (*who, what, where, how*) dari suatu fenomena tanpa tujuan utama membangun teori baru atau menguji hipotesis kuantitatif kompleks.

Dalam konteks penelitian ini, alasan yang paling mendasar memilih pendekatan kualitatif-deskriptif dimaksudkan untuk menggali dan mendeskripsikan secara rinci mengenai manajemen pembelajaran, khususnya penerapan proses belajar dan Sistem Credit Point—di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar memeriksa frekuensi atau korelasi kuantitatif pelanggaran disiplin, melainkan berusaha menampilkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana proses manajerial diterapkan, bagaimana siswa meresponsnya, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, karena peneliti menganalisis dan mendeskripsikan secara terperinci mengenai suatu lembaga. Coombs, (2022) menyatakan, studi kasus merupakan suatu pendekatan metodologis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang suatu isu atau fenomena kontemporer dalam suatu sistem yang terbatas. Penelitian studi kasus dilakukan melalui penyelidikan mendalam terhadap individu, kelompok, atau peristiwa tertentu untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena kehidupan nyata. Dikatakan sebagai penelitian kualitatif jenis studi kasus, karena peneliti menekankan pada pengungkapan fakta yang terkait dengan penerapan sistem credit point pada manajemen pendidikan dan pengaruhnya terhadap peningkatan disiplin belajar siswa di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan.

“Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan, perekaman, dan interpretasi data. Sebagaimana dinyatakan oleh Bogum Yoon dan Christine Uliassi (2022), ‘researcher-as-instrument’ merupakan prinsip metodologis yang menempatkan peneliti sebagai alat penelitian yang aktif dan refleksif dalam semua tahap penelitian.”

Peneliti dalam studi ini berperan sebagai pengamat, dimana melalui pengamatan terhadap seluruh kegiatan manajemen pembelajaran, peneliti secara langsung mengumpulkan data, mencatat kejadian, dan menginterpretasikan dinamika penerapan sistem credit point pada manajemen pendidikan dan pengaruhnya terhadap peningkatan disiplin belajar siswa di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan. Penelitian dilaksanakan di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan yang terletak di Jalan Kapiten Purba I,

kelurahan Mangga, kecamatan Medan Tuntungan

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data manusia dan non manusia. Orang-orang yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian ini, yaitu: Kepala sekolah (Drs.Rafael Sitanggang, M.Si), Wakil kepala urusan kesiswaan (Tohap Sihombing,S.Pd), beberapa guru (wakil dari mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK), serta 12 siswa terpilih. Pemilihan informan bersifat purposive untuk memperoleh data yang kaya dan relevan. Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen atau arsip yang terkait dengan fokus penelitian ini, yaitu: analisis buku pelanggaran, catatan kehadiran, rekapitulasi poin, dan kebijakan tertulis tentang SCP.

Penentuan teknik yang tepat sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. “Teknik pengumpulan data adalah langkah-terpenting dalam penelitian karena melalui teknik ini peneliti memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai setting, dengan berbagai sumber dan menggunakan berbagai cara. Berdasarkan tekniknya, maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan (triangulasi).” (Sugiyono, 2022)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab dan bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan atau tanpa panduan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan, yaitu jenis teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara namun pertanyaan dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan. Pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti yaitu: Kepala TK (Drs.Rafael Sitanggang,M.Si) dan beberapa orang guru (Tohap Sihombing,S.Pd, Elly Hutapea, S.Pd, Adrina Mona Sidabalok S.Pd, M.P.Pd, Sondang Simbolon,S.Pd). Sedangkan teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia. Adapun dokumen yang diambil diantaranya dokumen mengenai profil SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan, analisis buku pelanggaran, catatan kehadiran, rekapitulasi poin, dan kebijakan tertulis tentang SCP, serta gambar-gambar mengenai proses manajemen

pembelajaran dalam rangka penerapan sistem credit point pada manajemen pendidikan.

Menurut Sugiyono (2022), analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis data diartikan sebagai proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sugiyono menegaskan bahwa kegiatan analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada hal-hal pokok sesuai fokus penelitian; (2) penyajian data (data display), yaitu penyusunan informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis; serta (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan tahap untuk mencari makna dan menemukan pola dari data yang telah terkumpul.

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa melalui beberapa teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, triangulasi (sumber dan metode), serta ketekunan pengamatan sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2022) dalam pendekatan penelitian kualitatif. Tahapan penelitian juga meliputi tahap pralaksanaan, persiapan, pelaksanaan, dan analisis, yang dijalankan secara berkesinambungan hingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Credit Point dalam Kerangka Manajemen Pendidikan

Sistem credit point pelanggaran tata tertib yang diterapkan di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan merupakan instrumen formal yang dirancang untuk mengelola perilaku peserta didik secara terukur dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan sekolah mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memberikan respons terhadap berbagai bentuk ketidakpatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah. Dalam konteks pendidikan modern, mekanisme seperti ini menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, produktif, dan kondusif bagi pertumbuhan karakter.

Penggunaan skor poin sebagai indikator kedisiplinan juga memfasilitasi proses evaluasi perilaku secara objektif tanpa bias personal.

Pelanggaran yang berkaitan dengan keterlambatan dan ketidakhadiran ditempatkan sebagai kategori pertama karena kehadiran merupakan fondasi dari partisipasi belajar. Tindakan seperti keterlambatan, absen tanpa keterangan, dan masuk sekolah melalui jalur yang tidak sah dikenai poin 25–100. Berdasarkan teori manajemen kelas menurut Emmer & Sabornie (2020), kehadiran tepat waktu merupakan indikator dasar komitmen akademik. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat berdampak negatif pada pencapaian belajar dan keterlibatan sosial, sehingga pemberian poin ini berfungsi sebagai upaya preventif untuk membentuk perilaku bertanggung jawab.

Kategori kedua yang memuat pelanggaran seragam dan atribut sekolah menggambarkan perhatian institusi terhadap kerapian, keseragaman, serta pembangunan identitas sekolah. Pelanggaran seperti penggunaan atribut yang tidak lengkap, rambut tidak sesuai ketentuan, hingga pengecatan rambut dikenai poin 25–50, sementara tindakan ekstrem seperti bertato bernilai 250 poin. Secara teoretis, aturan seragam berfungsi menjaga sense of belonging dan mengurangi kesenjangan sosial antar peserta didik (Pellegrini & Smith, 2019). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan seragam tidak hanya mendorong disiplin, tetapi juga memperkuat nilai kesetaraan.

Pelanggaran pada saat kegiatan belajar-mengajar (KBM) memiliki bobot poin 25–150 dan meliputi tindakan seperti meninggalkan kelas tanpa izin, tidak mengerjakan tugas, hingga bermain di luar kelas. Keseluruhan bentuk pelanggaran ini berpotensi mengganggu instructional flow guru dan hak belajar peserta didik lain. Dalam teori manajemen kelas, tindakan yang mengganggu alur pembelajaran dianggap sebagai bentuk perilaku diluar tugas-off-task behavior yang harus segera ditindak agar tidak berkembang menjadi pola perilaku jangka panjang. Dengan demikian, keberadaan kategori ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menjaga kualitas proses pembelajaran.

Kategori pelanggaran saat ujian berkaitan erat dengan integritas akademik. Tindakan seperti mencontek, bertanya kepada teman, bertukar lembar jawaban, hingga mengakses internet untuk mencari jawaban diberi bobot antara 50–150 poin. Dalam perspektif etika

pendidikan, integritas merupakan nilai utama yang harus ditanamkan pada peserta didik sejak dini. Aturan ketat terhadap kecurangan merujuk pada prinsip bahwa kejujuran akademik merupakan bagian dari pendidikan karakter yang tidak dapat dinegosiasi. Menurut teori character education, pelanggaran integritas harus ditangani secara konsisten untuk membangun budaya kejujuran dan tanggung jawab.

Pelanggaran ketertiban umum, yang meliputi tindakan merokok, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, dan tidak mengikuti kegiatan wajib sekolah, mendapat bobot 25–200 poin. Pelanggaran yang lebih berat, seperti perbuatan asusila dan keterlibatan geng motor, dapat mencapai 1500 poin. Kategori ini menunjukkan bahwa sekolah berperan tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembentukan budaya sosial yang beradab. Aksi merusak fasilitas, misalnya, mencerminkan kurangnya nilai kepedulian dan tanggung jawab, yang menurut Lickona (2018) merupakan dua pilar utama pendidikan karakter.

Kategori etika antarwarga sekolah mencakup penghinaan, berbohong, melawan guru, hingga tindakan fisik terhadap guru atau teman. Rentang poin yang diberikan (25–1500) menunjukkan betapa seriusnya sekolah menanggapi isu ini. Pelanggaran etika mengancam iklim sosial sekolah dan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Dalam teori iklim sekolah-school climate, interaksi antarwarga sekolah merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Tindakan tidak menghargai orang lain atau melakukan kekerasan verbal dan fisik mencerminkan pelanggaran terhadap norma moral, sehingga perlu ditindak untuk mencegah berkembangnya budaya agresivitas.

Pelanggaran berupa penipuan, seperti pemalsuan tanda tangan surat izin atau pencurian, mendapat poin 50–300. Kategori ini menggarisbawahi pentingnya nilai kejujuran dan kepercayaan. Dalam konteks manajemen pendidikan, kepercayaan adalah fondasi yang memungkinkan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua berjalan harmonis. Praktik penipuan mengganggu hubungan tersebut dan mengikis nilai moral peserta didik. Karena itu, sekolah memberikan bobot poin yang signifikan untuk tindakan ini sebagai upaya membangun budaya integritas.

Kategori tindakan kriminal mencakup serangkaian pelanggaran berat seperti tawuran,

membawa senjata tajam, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, hingga perjudian. Pelanggaran dengan tingkat tertinggi mencapai 1500 poin dan dapat menyebabkan peserta didik dikembalikan ke orang tua. Dari perspektif perlindungan anak, sekolah memiliki tanggung jawab melindungi peserta didik dari segala bentuk kekerasan, ancaman, dan keterlibatan dalam tindakan berisiko tinggi. Dengan demikian, pemberian poin maksimal menjadi bentuk proteksi dan penegasan bahwa sekolah menolak segala bentuk kriminalitas.

Pelanggaran perundungan (bullying) ditempatkan sebagai kategori tersendiri yang menunjukkan kepedulian sekolah terhadap isu kekerasan psikologis dan sosial. Tindakan seperti memukul, memalak, mengejek, mempermalukan, hingga menyebarkan konten bermuatan kekerasan dikenai poin antara 100–300. Pendekatan ini selaras dengan pemahaman modern bahwa perundungan (bullying) memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental peserta didik. Menurut teori pembelajaran social emosional-social-emotional learning (SEL), lingkungan sekolah harus mengembangkan empati, kesadaran sosial, dan kemampuan manajemen diri agar kasus-kasus bullying dapat diminimalisasi.

Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme sanksi bertingkat berdasarkan akumulasi poin, mulai dari peringatan, pemanggilan orang tua, penandatanganan surat perjanjian, skorsing, hingga pengembalian peserta didik kepada orang tua. Sistem bertahap ini sejalan dengan prinsip progressive discipline, yaitu penegakan aturan yang mengutamakan pembinaan sebelum pemberian hukuman berat. Pendekatan ini memastikan bahwa sekolah tetap berorientasi pada pendidikan, bukan semata-mata pada penalti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Credit Point (SCP) di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan berlangsung melalui kerangka manajemen pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kajian dokumen menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki perangkat kebijakan tertulis berupa tata tertib, daftar kategori pelanggaran, bobot poin, dan prosedur tindak lanjut. Dokumen tersebut menjadi instrumen administratif yang memudahkan guru dalam melakukan tindakan disipliner secara objektif dan konsisten.

Pada tahap pelaksanaan, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru Bimbingan Konseling merupakan pelaksana utama. Guru wali kelas dan Bimbingan Konseling mendokumentasikan pelanggaran ke dalam buku poin yang kemudian direkap secara berkala untuk dianalisis oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Observasi menunjukkan bahwa konsistensi guru sangat menentukan keberhasilan sistem. Guru yang memahami ketentuan dengan baik mampu memberikan poin dengan cepat dan akurat, sedangkan sebagian guru masih memerlukan pembiasaan dan peningkatan kompetensi administrasi.

Dalam implementasinya, sistem credit point melibatkan berbagai aktor pendidikan, seperti wali kelas, guru mata pelajaran, BP/BK, piket sekolah, hingga kepala sekolah. Keterlibatan semua pihak mencerminkan model tata kelola sekolah berbasis kolaborasi (*collaborative governance*). Kolaborasi ini meningkatkan validitas penilaian perilaku peserta didik dan memperkuat akuntabilitas institusi dalam menangani pelanggaran disiplin.

Dokumentasi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kewajiban penandatanganan setiap poin pelanggaran oleh peserta didik menunjukkan bahwa sekolah menerapkan pendekatan administratif yang transparan. Praktik ini tidak hanya memberikan bukti formal dalam proses pembinaan, tetapi juga melibatkan peserta didik secara langsung untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dokumentasi yang disajikan kepada orang tua pada setiap pembagian raport juga memperkuat komunikasi dan kemitraan antara sekolah dan keluarga.

Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan tidak sekadar mengandalkan pendekatan punitif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter, manajemen kelas, dan pembinaan perilaku. Keberadaan sistem credit point membantu sekolah menjaga ketertiban, menciptakan budaya disiplin, serta mengembangkan peserta didik menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu mengelola diri.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alkahtani (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem kedisiplinan berbasis poin sangat bergantung pada konsistensi guru serta kejelasan pedoman pelaksanaan. Selain itu, literatur menegaskan bahwa keberhasilan

manajemen perilaku siswa memerlukan aturan yang jelas, prosedur standar, dan koordinasi antarpelaksana (Anderson & Boyer, 2020).

Implementasi SCP di sekolah juga mengikuti prinsip *behavior management modern* yang menekankan kejelasan (*clarity*), konsekuensi (*consequence*), dan konsistensi (*consistency*). Kejelasan aturan dan bobot poin membantu mengurangi ambiguitas dalam pengambilan keputusan guru, sehingga perilaku siswa dapat dikontrol melalui penguatan (*reinforcement*) yang terstruktur. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara siswa yang menyatakan bahwa SCP memberikan kejelasan konsekuensi sehingga mereka “lebih berhati-hati” dalam bertindak. Dengan kata lain, SCP berfungsi sebagai instrumen pembentukan budaya disiplin yang terukur.

2. Pengaruh SCP terhadap Disiplin Belajar Siswa

a. Peningkatan Kehadiran dan Ketepatan Waktu

Analisis dokumen kehadiran menunjukkan penurunan jumlah keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa keterangan setelah SCP diterapkan. Wali kelas menegaskan bahwa siswa lebih disiplin datang tepat waktu karena “takut poin mereka bertambah”. Temuan ini memperkuat teori bahwa sistem disiplin berbasis poin dapat meningkatkan regulasi diri (*self-regulation*) melalui konsekuensi yang jelas (Hafen et al., 2021). Selain itu, siswa yang mencapai jumlah poin tertentu diwajibkan mengikuti konseling dan pendampingan orang tua, yang terbukti efektif menekan tingkat pelanggaran berulang. Intervensi berbasis keluarga seperti ini didukung oleh literatur sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan (Kim & Hill, 2020).

b. Ketertiban dan Kepatuhan dalam Proses Belajar Mengajar

Observasi kelas menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih tertib dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada kedisiplinan kehadiran di sekolah, menjaga kerapian baik seragam dan penampilan rambut), ketertiban saat ujian, etika terhadap sesama siswa dan guru dan tenaga kependidikan, menghindari tindakan kriminal, bullying dan penipuan. Semua aspek tersebut dimuat dalam poin-poin yang lebih detail dengan bobot yang berbeda. Guru menyatakan bahwa SCP membantu mereka menegakkan aturan tanpa harus berdebat panjang yang

menghabiskan waktu lebih lama karena bobot poin telah ditetapkan secara objektif. Temuan ini konsisten dengan kajian Mercer et al. (2019) yang menyatakan bahwa sistem poin dalam kelas (classroom point system) meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi perilaku mengacaukan (disruptive). SCP juga memperkuat norma kelas karena siswa saling mengingatkan untuk menaati aturan agar tidak merugikan kelompok atau reputasi kelas.

c. Tanggung Jawab Akademik dan Pembentukan Kesadaran Disiplin

Wawancara dengan siswa dan guru mengungkapkan bahwa SCP mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas akademik, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengikuti remedial. Sebagian siswa mulai memahami bahwa kedisiplinan bukan hanya soal menghindari hukuman, tetapi bagian dari karakter yang mereka bangun dalam proses pembelajaran. Hal ini mencerminkan transformasi dari disiplin berbasis kepatuhan (compliance-based discipline) menuju disiplin berbasis kesadaran (awareness-based discipline). Literatur menunjukkan bahwa sistem kedisiplinan yang dipadukan dengan pembinaan karakter lebih efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang (Benner et al., 2019). Dalam konteks SCP, konseling BK dan diskusi antara guru-siswa berperan sebagai media internalisasi nilai-nilai disiplin.

3. Faktor Pendukung Keberhasilan SCP

Keberhasilan implementasi SCP sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam memberikan legitimasi dan arahan strategis. Kepala sekolah memastikan bahwa guru memahami SOP, melakukan monitoring, serta mengadakan evaluasi berkala. Menurut Hallinger (2021), kepemimpinan instruksional yang kuat mampu meningkatkan efektivitas kebijakan kedisiplinan karena memberikan arah, dukungan, dan kontrol yang diperlukan. Kedua, komitmen guru menjadi faktor kunci dalam memastikan sistem berjalan konsisten. Guru berperan sebagai pengawas, pendidik, dan administrator. Keberhasilan sistem kedisiplinan sangat bergantung pada ketepatan guru mencatat dan memberikan poin yang sesuai. Temuan ini sejalan dengan penelitian O'Neill & Stephenson (2019) yang menyatakan bahwa konsistensi guru adalah variabel paling penting dalam

keberhasilan program manajemen perilaku sekolah. Selain itu, keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting. Orang tua yang diundang ke sekolah umumnya memberikan dukungan terhadap pemberian poin dan pembinaan lanjutan. Sinergi antara sekolah dan orang tua terbukti meningkatkan perilaku positif siswa (Wang & Sheikh-Khalil, 2019).

4. Hambatan dalam Implementasi SCP

Penelitian menemukan bahwa beberapa hambatan mengurangi efektivitas SCP. Pertama, pemahaman siswa tentang SCP belum merata; sebagian siswa menganggap SCP sebagai mekanisme hukuman semata sehingga belum sepenuhnya muncul kesadaran intrinsik tentang pentingnya disiplin. Kondisi ini sejalan dengan temuan Putnam et al. (2020) bahwa sistem poin hanya efektif jangka panjang apabila disertai pembinaan karakter dan komunikasi yang persuasif. Kedua, sistem pencatatan masih dilakukan secara manual sehingga rawan keterlambatan dan ketidakkonsistenan. Guru dengan beban kerja tinggi sering menunda pencatatan, sehingga data poin tidak selalu mutakhir. Hal ini menunjukkan perlunya digitalisasi sistem, sebagaimana dianjurkan oleh penelitian Kurniawan (2022) tentang pentingnya manajemen kesiswaan berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Ketiga, komunikasi dengan orang tua belum optimal karena tidak semua orang tua merespons panggilan sekolah. Keterbatasan ini berdampak pada proses pembinaan siswa, terutama bagi siswa yang memerlukan intervensi keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Credit Point (SCP) mampu meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAS Katolik Budi Murni 2 Medan melalui mekanisme pembinaan yang terstruktur dan berbasis konsekuensi. SCP berpengaruh pada peningkatan kehadiran, ketertiban kelas, kepatuhan terhadap tata tertib, serta tanggung jawab akademik siswa. Keberhasilan implementasi SCP ditopang oleh kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, serta keterlibatan orang tua. Meskipun demikian, beberapa hambatan tetap ditemukan, seperti pemahaman siswa yang belum merata, pencatatan manual yang rawan keterlambatan, dan komunikasi sekolah-orang tua yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi,

pelatihan guru, pendekatan persuasif kepada siswa, serta digitalisasi sistem poin direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas SCP sebagai instrumen pembinaan karakter dan manajemen pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada seluruh individu dan pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama proses penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Alkahtani, K. (2022). Classroom behavior management strategies and their effectiveness: A systematic review. *Educational Research Review*, 36, 100463.
- Anderson, C., & Boyer, K. (2020). Schoolwide behavior management systems: Leadership, consistency, and implementation. *Journal of Educational Administration*, 58(4), 410–430.
- Benner, G. J., Kutash, K., Nelson, J. R., & Fisher, M. B. (2019). Closing the achievement gap of youth with emotional and behavioral disorders through evidence-based practices. *Remedial and Special Education*, 40(1), 5–18.
- Carsiwan. (2024). *Trends in character education for elementary, middle and high school students in Indonesia: Systematic literature review*. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 7(2), 240–252.
<https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i2.80764>
[Ejournal Undiksha](#)
- Darwin, M. A. R., & Silahuddin. (2024). *Reevaluating moral education: Addressing bullying in schools through a collaborative framework*. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 7(2), 211–223.
<https://doi.org/10.23887/ivcej.v7i2.79560>.
[Ejournal Undiksha](#).
- Elias, M. J. (2025). Social-emotional competencies and character are at the foundation of education regardless of technology. *Frontiers in Education*, 10, 1607639.
<https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1607639>. Frontiers
- Hafen, C. A., et al. (2021). Student–teacher interactions and the development of student self-regulation. *Child Development*, 92(2), 499–517.
- Hallinger, P. (2021). A review of research on educational leadership and management in Asia: A twenty-year analysis. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(1), 5–22.
- Handoko, H., Sartono, E. K. E., & Retnawati, H. (2024). *The implementation of character education in elementary school: Strategy and challenge*. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(4), 619–631.
<https://doi.org/10.23887/jisd.v7i4.62102>
[Ejournal Undiksha](#)
- Hasibuan, E. F., & Nasution, N. (2024). *Character education through social studies learning in elementary schools*. (Dalam) “The Effectiveness of Character Education in Improving Student Discipline in Elementary Schools” di *Indonesian Journal of Education (INJOE)*. [Injoe](#)
- Khasbiyah, A., Apriani, D., Basukiyatno. (2025). Implementing positive discipline to enhance character education in high schools. *Research Horizon*, 5(5), 826.
<https://doi.org/10.54518/rh.5.5.2025.826>
LifeSciFi Journal
- Kim, Y., & Hill, N. E. (2020). Parenting and adolescent academic behaviors: Longitudinal effects. *Journal of Youth and Adolescence*, 49(1), 140–155.
- Kurniawan, D. (2022). Digital administration system for school discipline monitoring: Improving accuracy and efficiency. *Journal of Educational Technology*, 9(3), 211–220.
- Mercer, S. H., et al. (2019). Effects of classroom point systems on student academic engagement. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 21(4), 227–239.
- O’Neill, S. C., & Stephenson, J. (2019). Evidence-based classroom management: The role of teacher consistency. *Teaching and Teacher Education*, 86, 102904.
- Putnam, R. F., et al. (2020). Behavior interventions and reinforcement systems in school settings. *School Psychology Review*, 49(2), 123–140.
- Syahbudin, Darnawati, Irawaty, Abubakar, S. R., & Mustar, S. Y. (2024). *Character education in junior high schools: Teachers’ perceptions and implementation*

challenges. Indonesian Values and Character Education Journal, 7(2), 260–270.

<https://doi.org/10.23887/ivcej.v7i2.80687>.
[Ejournal Undiksha](#).

Wahyu Sobirin, Asep Rohendi, Cecep Mustofa Zajuli, Eva Dianawati Wasliman, & Iim Wasliman. (2024). *Mengukur efek pendidikan karakter terhadap reduksi perundungan di sekolah menengah kejuruan (SMK)*. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 11(2), 1196.

<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i2.1196>. [Jurnal STKIP PGRI Situbondo](#)

Wang, M. T., & Sheikh-Khalil, S. (2019). Does parental involvement matter for student achievement? *Child Development*, 90(5), 1574–1591.